



# **RENCANA KERJA 2022**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL IX**

Jalan Baru No. 100B Kotaraja, Abepura, Jayapura  
0967-587726 | [jayapura.bkn.go.id](http://jayapura.bkn.go.id)

## KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, harus memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen daklam rangka pencapaian sasaran pembangunan Manajemen ASN, maka setiap tahun seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Secara khusus di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Renja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 dengan indikator kinerja Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara 2020-2024, dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.

Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik dan memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, serta seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja, Badan Kepegawaian Negara perlu melakukan perubahan Renja Tahun 2020. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021 dibuat untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

Jayapura, Desember 2021

Kepala Kantor Regional IX  
Badan Kepegawaian Negara



Sabar Parlindungan Sormin, S.Kom., MMSI.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2021, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-201 dengan indikator kinerja Covid-19. Pandemi COVID-19 dengan indikator kinerja telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pasca pandemi Covid-19 dengan indikator kinerja, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), dimana proses transformasi akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan alam. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2021 dengan indikator kinerja menunjukkan bahwa PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air dan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya. Dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut dan kondisi Indonesia pada tahun 2020 maka tema RKP 2022, “ **Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”

Dokumen RKP 2022 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam Prioritas Nasional, Prioritas Program, dan Kegiatan Prioritas dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Adapun 7 (tujuh) PN RKP 2022 meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Melihat kepada kondisi saat ini serta adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dan redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Badan Kepegawaian Negara perlu menyusun dan menyesuaikan kembali perubahan Rencana kerjanya dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022 ini merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Manajemen ASN pada tahun 2022.

## **C. RUANG LINGKUP**

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

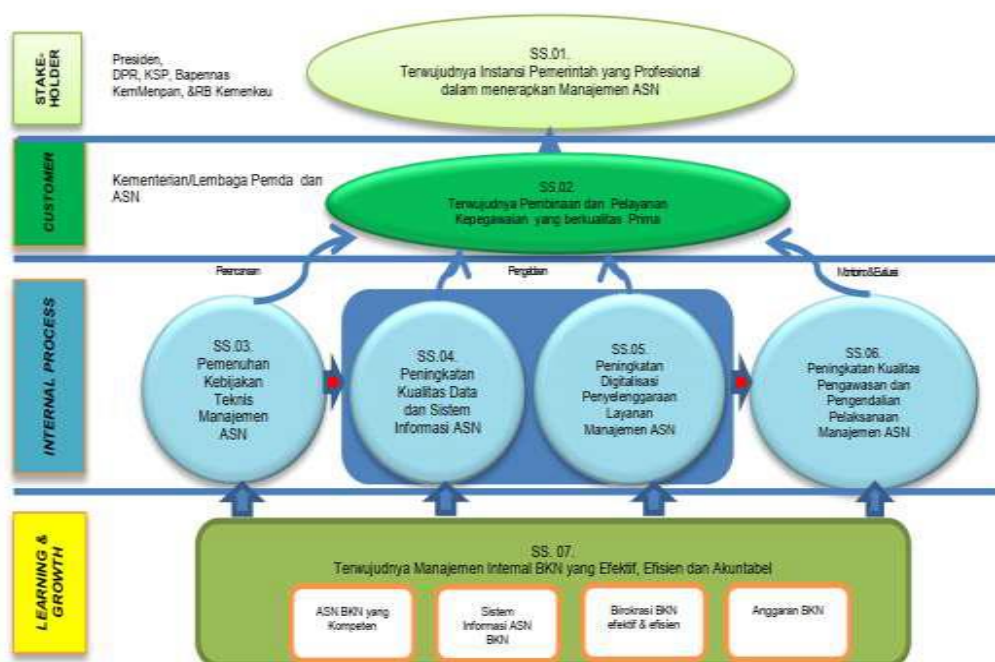
1. Arah kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Tahun 2022
2. Program Prioritas Tahun 2022
3. Rencana Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

## BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN

### A. SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara JAYAPURA Tahun 2020-2024, Visi BKN adalah “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang merupakan pelaksanaan Misi Presiden Nomor 8, sesuai dengan Arahan Presiden Nomor 4 serta sesuai dengan Agenda Pembangunan Nomor 7. Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card (BSC)* yang dibagi dalam 4 empat perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Berikut Peta Strategis Kantor Regional IX BKN Jayapura:

### PETA STRATEGIS KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA TAHUN 2020-2024



Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh program yang akan dilaksanakan (*money follow program*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (*money follow function*). Teknis perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan. Lima Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 akan fokus pada aspek ekonomi dan reformasi sosial pasca pandemi virus corona (Covid-19). Dalam RKP 2022 satu dari tujuh Prioritas Nasional yang merupakan tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah transformasi pelayanan publik.

## **B. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang diusung oleh Kantor Regional IX BKN Jayapura diwujudkan dengan fokus pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memperhatikan capaian kinerja dan periode tahunan. Arah kebijakan program kegiatan 5 (lima) tahun ke depan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masing-masing fungsi di Kantor Regional IX BKN Jayapura dalam melaksanakan dan menyelaraskan strategi untuk dapat mengoptimalkan peran Kantor Regional IX BKN Jayapura sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian Negara di wilayah kerjanya yaitu seluruh wilayah Papua, dengan arah kebijakan dan strategi yang difokuskan guna:

1. Menjadikan Renstra Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan utama dalam menerjemahkan tugas dan fungsi Kantor Regional IX BKN Jayapura ke dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Memfokuskan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada 4 (empat) poin utama tanggung jawab Kantor Regional IX BKN Jayapura, yaitu: pembinaan, pelayanan, tata kelola, dan sistem informasi;
3. Melakukan pembenahan pada aspek kelembagaan dan tata laksana secara terpadu dalam rangka mendukung strategi Kantor Regional IX BKN Jayapura;
4. Melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, BUMN, dan/atau swasta, baik di dalam maupun di luar negeri terkait kepegawaian dan manajemen ASN;

5. Melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2020 – 2024 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura c.q. Kepala Bagian Tata Usaha dengan dibantu oleh sub bagian Perencanaan dan Keuangan memastikan penjabaran (*cascading*) Renstra Kantor Regional IX BKN Jayapura ke dalam program kerja masing-masing bidang kerja;
  - b. Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura c.q. Kepala Bagian Tata Usaha dengan dibantu Sub Bagian Kepegawaian melakukan harmonisasi kinerja antara bidang kerja ke kinerja tingkat individu;
  - c. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, Bidang Pengangkatan dan Pensiun, Bidang Informasi Kepegawaian, dan Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian bersama-sama melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban kinerja untuk masing-masing bidang, berkoordinasi dengan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Kantor Regional IX BKN Jayapura telah menetapkan sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas kinerja maupun pelayanan bidang kepegawaian sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN.
2. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
3. Terselenggaranya Manajemen ASN berkualitas prima.
4. Meningkatnya kualitas Sistem Informasi ASN.
5. Ditegakkannya Tata Kelola Manajemen Kantor Regional IX BKN Jayapura



**BAB III**  
**RENCANA KINERJA**

**A. SASARAN TAHUN 2022**

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA**

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>				
<b>SS.1</b>	Terwujudnya instansi pemerintah profesional menerapkan ASN	instansi yang dalam manajemen	<b>IKU.1</b> Persentasi Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASM Sesuai NSPK di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN	<b>40</b>
			<b>IKU.2</b> Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN	<b>100</b>
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
<b>SS.2</b>	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	pembinaan	<b>IKU.3</b> Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN	<b>95</b>
			<b>IKU.4</b> Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN	<b>95</b>
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				



<b>SS.3</b>	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	<b>IKU.5</b>	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN	<b>100</b>
<b>SS.4</b>	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN	<b>IKU.6</b>	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN	<b>95</b>
<b>SS.5</b>	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN	<b>IKU.7</b>	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional IX BKN	<b>100</b>
<b>SS.6</b>	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	<b>IKU.8</b>	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN	<b>85</b>

---

**LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE**

---

<b>SS.7</b>	Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel	<b>IKU.9</b>	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional IX BKN	<b>80</b>
		<b>IKU.10</b>	Indeks maturitas SPBE kanreg IX BKN	<b>100</b>
		<b>IKU.11</b>	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional IX BKN	<b>82</b>
		<b>IKU.12</b>	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional IX BKN	<b>79</b>
		<b>IKU.13</b>	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional IX BKN	<b>93</b>
		<b>IKU.14</b>	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan di Kantor Regional IX BKN	<b>100</b>

---

**B. PROGRAM DAN ANGGARAN 2022**

Menindak lanjuti Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-375/MK/02/2020, B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pelaksanaan restrukturisasi Program K/L yang berlaku efektif di TA 2021. Kebijakan

restrukturisasi dilakukan pada tingkat Program, dimana nomenklatur Program dapat digunakan oleh satu atau lebih dari satu Kementerian /Lembaga, selanjutnya disebut Program Lintas K/L. Adapun tujuan dari restrukturisasi Program K/L adalah 1). Meningkatkan sinkronisasi program pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran, 2).Meningkatkan Integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara, 3). Mengurangi tumpang tindih kegiatan antar K/L, 4). Mempertajam rumusan program sehingga dapat mencerminkan substansi program secara langsung sesuai dengan nama program.

Selain penyederhanaan program, dampak dari RSPP ini adalah penyesuaian nomenklatur output menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Pelaksanaan Pagu Anggaran: SP DIPA-088.01.2.622390/2021 tanggal 17 November 2021, Pagu Anggaran Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura adalah sebesar Rp. 10.368.284.000-.

Rincian pagu indikatif Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU ALOKASI (DALAM RIBU RUPIAH)</b>
1. Program Kebijakan ,Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN	Rp. 1.550.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.818.284
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 10.368.284</b>

### C. PROGRAM DAN ANGGARAN

Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*) serta penguatan kapasitas kebijakan *countercyclical* baik melalui penguatan *automatic stabilizer* maupun pencadangan belanja *anticipatory*. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang akan berlaku efektif untuk TA 2022. Sinergi Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam merumuskan Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dituangkan dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 12 Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S- 376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.05/05/2020 tanggal 8 Mei

2020 Hal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, pagu indikatif telah disajikan berdasarkan program hasil Redesain Sistem Penganggaran. Penyederhanaan Redesain Turunan Program yang meliputi Rumusan Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output, beserta desain arsitekturnya. Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan UKE II atau Satker vertikal dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran. Keluaran harus mencerminkan “*real work*” atau “*eye catching*” merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan dengan rumusan KRO dan RO. Berikut adalah program yang telah direstrukturisasi dan diredesain di lingkungan Badan Kepegawaian Negara:

1. Program Generik, yaitu Program Dukungan Manajemen merupakan penggabungan dari beberapa program:
  - a. Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN
  - b. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN
  - c. Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara
2. Program Teknis, yaitu Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024, bersifat lintas K/L.

Berikut penyesuaian program, KRO dan RO untuk Badan Kepegawaian Negara dan Satuan Kerja dibawahnya sebagai dampak dari penerapan RSPP:

1. Program Dukungan Manajemen Kegiatan yang dilaksanakan:
  - a. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik dengan indikator kinerja: Persentase ketersediaan informasi yang sesuai standar layanan informasi publik.
  - b. Pengelolaan organisasi dan SDM dengan indikator kinerja: Indeks kepuasan pegawai BKN terhadap pengelolaan dan pembinaan SDM BKN sesuai NSP 13.
  - c. Pengelolaan keuangan, BMN dan Umum dengan indikator kinerja: Pengelolaan laporan keuangan yang sesuai SAP, Persentase pemanfaatan anggaran BKN, Persentase pemenuhan dokumen SAKIP BKN, Persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai dengan standar.
  - d. Pengelolaan resiko, pengendalian dan pengawasan internal dengan indikator kinerja: Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal BKN.
2. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran indeks profesional ASN
- b. Pengelolaan dokumen arsip kepegawaian, data dan sistem informasi ASN dengan indikator kinerja:
  - 1) Persentase tata naskah kepegawaian ASN yang dikelola
  - 2) Persentase digitalisasi arsip kepegawaian
  - 3) Persentase pemutahiran data ASN
  - 4) Persentase integrasi data ASN
- c. Penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi ASN dengan indikator kinerja:
  - 1) Persentase instansi yang telah memanfaatkan hasil penilaian kompetensi assessment center BKN
  - 2) Nilai indeks kepuasan pelayanan
  - 3) Persentase lembaga penyelenggara penilaian kompetensi yang telah di akreditasi
- d. Pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN dengan indikator kinerja:
  - 1) Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan tata kelola manajemen ASN sesuai NSPK di Wilayah Kanreg IX BKN
  - 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti
- e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian ASN dengan indikator kinerja:
  - 1) Indeks kepuasan atas pelayanan kepegawaian di bidang pengadaan dan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya
  - 2) Persentase pelayanan di bidang pengadaan dan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya berbasis digital
  - 3) Persentase pelayanan pensiun berbasis digital
  - 4) Indeks kepuasan atas pelayanan kepegawaian di bidang pensiun.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan rencana kerja tahun 2022 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dengan indikator kinerja Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, dan juga mengacu pada Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Tahun 2021 ini merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2022. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura tahun 2022 perlu diambil langkah- langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih matang berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan pihak yang terkait baik.